

Pointers Webinar Laboratorium Indonesia 2045 dan LP3ES

Memperkuat Demokrasi di Indonesia

Yustinus Prastowo

Staf Khusus Menteri Keuangan RI Bidang Komunikasi Strategis

Jumat, 26 Agustus 2022

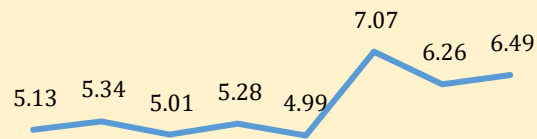


Tiga Aspek Penting Kehidupan Publik (John Maynard Keynes)

- **Personal Freedom**
- **Social Justice**
- **Economic Growth**

Ketimpangan, Kemiskinan, Pengangguran sebagai cermin....

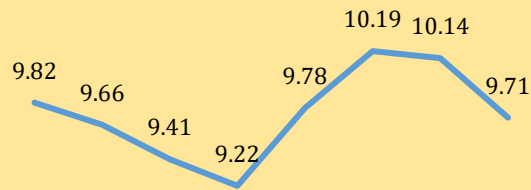
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)



Sumber: BPS

Feb	Aug	Feb	Aug	Feb	Aug	Feb	Aug
2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021

Tingkat Kemiskinan (%)



Sumber: BPS

Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept
2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021

Rasio Gini



Sumber: BPS

Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept
2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021

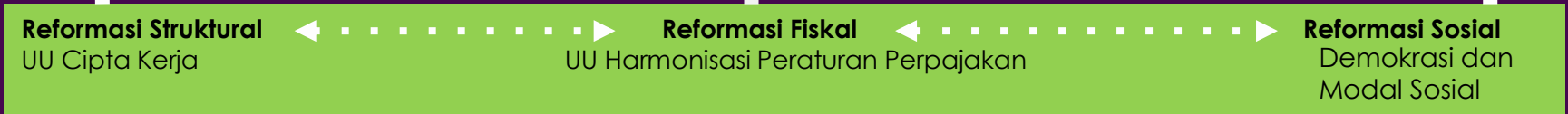
Sumber: Kemenkeu



Tujuan NKRI



Pendapatan
Belanja
Pembiayaan



APBN YANG SEHAT DAN BERKELANJUTAN

Indonesia Maju

Indonesia yang Kompetitif, Masyarakat Sejahtera, Generasi yang Cerdas,
Pertahanan Negara yang Kuat

APBN yang Sehat dan Berkelanjutan, Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi, serta Basis Pajak yang Luas

Penerimaan
Perpajakan
Berkelanjutan

PNBP Yang
Optimal

Belanja
Negara
Berkualitas

Pembiayaan
Efisien &
Pruden

Sumber Daya Alam

Dukungan Politik

Partisipasi Masyarakat

Stabilitas Hukum

Sumber Daya Manusia

APBN Sebagai Instrumen Demokrasi yang Partisipatoris dan Mewujudkan Kesenjangan



APBN adalah instrumen untuk menjadi alat demokrasi dengan syarat yaitu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.



Yang menjadi tantangan yaitu penggunaan anggaran belanja apakah telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini, APBN berperan penting dalam pembiayaan negara.



APBN telah dirumuskan secara partisipatoris dan dirancang dengan melibatkan DPR dan seluruh pihak terkait. Hal ini tercermin dalam respon cepat dan adaptif dalam menghadapi pandemi COVID-19.

APBN MAMPU MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR



FUNGSI ALOKASI *Public Goods*



FUNGSI DISTRIBUSI *Income Redistribution*



FUNGSI STABILISASI *Economic Stability & Growth*

- Dalam 10 tahun terakhir, pendapatan negara cenderung turun sekitar 10% PDB kapasitas fiskal terbatas untuk pengeluaran negara
- Dalam kondisi krisis, APBN sebagai *countercyclical* - fungsi distribusi dan stabilisasi lebih prioritas untuk *survival* dan *recovery* ekonomi. Fungsi alokasi dilakukan rasionalisasi dan *spending better*.
- Reformasi fiskal dan reformasi struktural dilakukan untuk meningkatkan produktivitas perekonomian dan menjaga sustainability fiskal jangka panjang

Anggaran prioritas dan arah kebijakan APBN terus mendukung perlindungan kepada masyarakat

(Triliun Rp)

Anggaran Prioritas	2019	2020	2021	APBN 2022	KEM-PPKF 2023	
					Batas Bawah	Batas Atas
Kesehatan	113,6	172,3	298,4	255,4	152,0	207,0
Covid Related (PEN)		52,4	180,4	116,4		
Reguler		119,9	117,9	139		
Perlinsos	308,4	498	469,4	431,5	319,5	360,8
Covid Related (PEN)		276,1	230,0	186,7		
Reguler		221,9	239,4	244,8		
Pendidikan	460,3	473,7	484,5	542,8	549,5	590,5
Infrastruktur	394,1	307,3	406,1	365,8	395,1	412,0

Regulasi & Insentif

Reformasi Birokrasi	Inovasi layanan publik digital, <i>right-sizing</i> (organisasi dan ASN), reformasi pensiun untuk produktivitas dan integritas ASN, <i>reward and punishment</i> untuk birokrasi yang efisien dan berintegritas
Revitalisasi Industri	Penguatan hilirisasi bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor
Pengembangan Ekonomi Hijau	Adaptasi teknologi hijau, pengembangan EBT, transisi energi, dan pengembangan pembiayaan berkelanjutan

ARAH KEBIJAKAN ANGGARAN PRIORITAS





ANGGARAN KESEHATAN DIPRIORITASKAN UNTUK Mendukung TRANSFORMASI KESEHATAN

Selain untuk penguatan kualitas layanan kesehatan, juga diarahkan untuk mendukung kemandirian industri sektor kesehatan

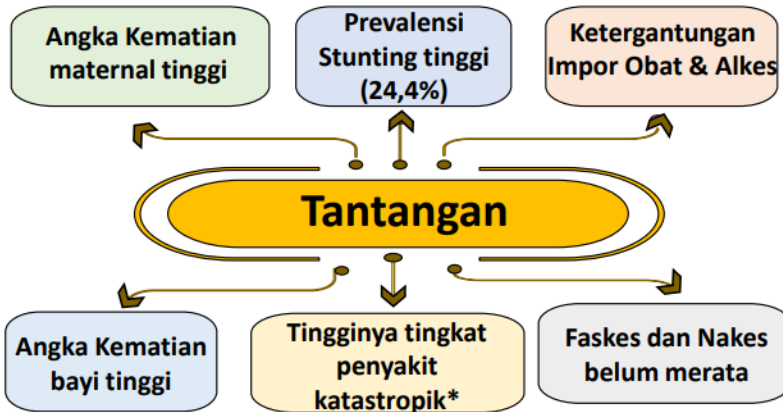
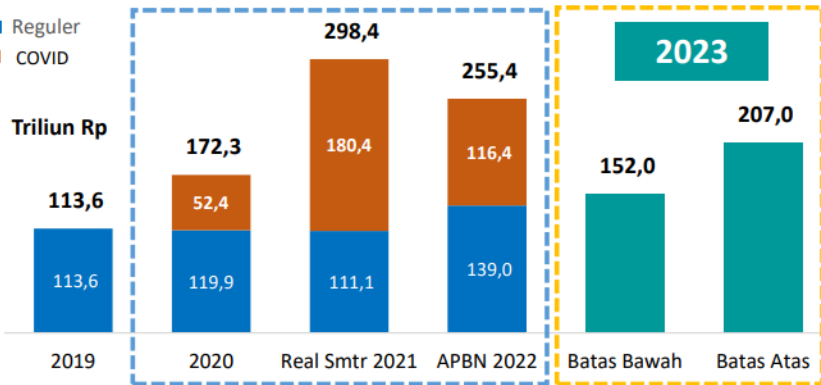


KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Masa Pandemi : al. vaksinasi, insentif nakes, faskes, perawatan pasien Covid-19

Menuju Endemi: Transformasi kesehatan

■ Reguler
■ COVID



ARAH KEBIJAKAN ANGGARAN KESEHATAN



Peningkatan layanan primer



Peningkatan mutu dan akses layanan rujukan



Penguatan Ketahanan Kesehatan



Perbaikan skema pembiayaan kesehatan



Perbaikan SDM kesehatan



Integrasi dan pengembangan teknologi kesehatan

*Jantung, kanker, gagal ginjal, stroke, sirosis hati, dsb
**Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

EXPECTED OUTCOME

Sumber: Bappenas



Prevalensi stunting 17,5%



Angka Kematian Ibu : 194
Angka Kematian Bayi:17



90% FKTP** terakreditasi, 95% RS terakreditasi



Insidensi TB: 211/100rb penduduk



Peningkatan Kemandirian Farmasi dan alkes



ANGGARAN PENDIDIKAN DIPRIORITASKAN UNTUK PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN

Peningkatan mutu SDM diperlukan sesuai tuntutan perubahan dan transformasi ekonomi pasca pandemi



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

EXCPECTED OUTCOME

Sumber: Bappenas dan Kemendikbud

- Peningkatan Human Capital Index (HCI) dan Skor PISA
- Rata-rata lama sekolah (usia > 15 thn): 9,2 tahun
- Sertifikasi kompetensi Guru SMK: 31%
- Angka Partisipasi: PAUD -> 47,8% PT -> 31,9%
- Lulusan vokasi yang langsung bekerja: 51,1%

ARAH KEBIJAKAN ANGGARAN PENDIDIKAN

Peningkatan akses pendidikan



a.l perluasan wajib belajar 12 tahun, bantuan pendidikan (beasiswa afirmasi, PIP, KIP Kuliah, penajakan *student loan*)

Peningkatan kualitas sarpras pendidikan, terutama daerah 3T



a.l melalui sinergi kebijakan Belanja K/L dan TKD dalam percepatan rehabilitasi/ pembangunan sarpras

Penguatan *link & match* dengan pasar kerja



a.l *teaching factory*, *science techno park*, program siap kerja, melalui insentif perpajakan

Pemerataan kualitas pendidikan



a.l program Guru Penggerak, simplifikasi kurikulum, transformasi tata kelola guru, BOS Kinerja

Penguatan kualitas layanan PAUD



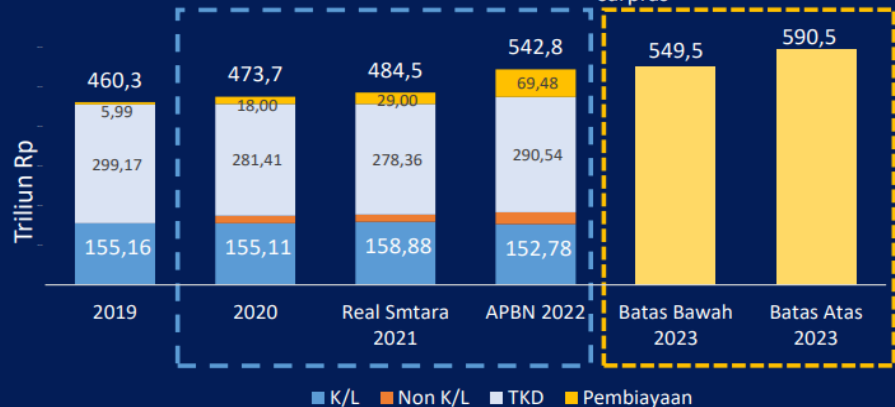
al. mendorong komitmen Pemda/ Pemdes untuk pembangunan PAUD melalui optimalisasi APBD/Dana Desa

Masa Pandemi:

Dukungan Pembelajaran Jarak Jauh, Pelatihan Kerja

Menuju Endemi:

Mengejar *learning loss*, perbaikan & pemerataan sarpras



Capaian skor PISA relatif stagnan

HCI lebih rendah dari *peers*

Tingkat partisipasi PAUD & Perguruan Tinggi masih rendah

Tantangan

Kompetensi guru masih rendah

Ketersediaan sarpras yang belum merata

Pengangguran lulusan vokasi meningkat

Peranan Penting Pemerintah dalam Redistribusi terus Mendorong Kesejahteraan di Daerah

Uraian (triliun rupiah)	2021			2022				
	Real s.d. Apr	Growth (%)	LKPP Unaudited	APBN	Real s.d. Mar	Growth (%)	Real s.d. Apr	Growth (%)
A. PENDAPATAN NEGARA	584,9	6,4	2.011,4	1.846,1	501,0	32,1	853,6	45,9
a./l. Penerimaan Perpajakan	453,5	4,4	1.547,9	1.510,0	401,8	38,4	676,1	49,1
1. Penerimaan Pajak	374,7	(0,5)	1.278,7	1.265,0	322,5	41,4	567,7	51,5
2. Kepabeanan & Cukai	78,7	36,5	269,2	245,0	79,3	27,3	108,4	37,7
II. PNPB	131,3	14,9	458,5	335,6	99,1	11,8	177,4	35,0
B. BELANJA NEGARA	723,0	15,9	2.786,4	2.714,2	490,6	(6,2)	750,5	3,8
I. BPP	489,8	28,1	2.000,7	1.944,5	314,2	(10,3)	508,0	3,7
II. TKDD	233,2	(3,4)	785,7	769,6	176,5	2,0	242,4	4,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(36,5)		(431,5)	(462,2)	94,7		220,9	
D. SURPLUS/(DEFISIT)	(138,2)	85,7	(775,0)	(868,0)	10,3		103,1	174,7
% thd PDB	(0,81)		(4,57)	(4,85)	0,06		0,58	
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	397,0	76,3	871,7	868,0	139,4	(58,1)	142,7	(64,1)
SILPA/(SIKPA)	258,8		96,8	-	149,7		245,8	

a. Dalam mengatasi dampak dari covid 19, Pemerintah Pusat **menambah anggaran belanja yang ditujukan utk pemulihan ekonomi atau PEN**. Pada tahun 2020, pemerintah merealisasikan belanja PEN sebesar 579,78T (22,3% dari total belanja negara), di 2021 sebesar 658,6T (23,6% dari total Belanja Negara) dan 2022 ini dianggarkan sebesar 455,6T.

b. Adapun program **PEN ini juga dirasakan manfaatnya oleh pemerintah daerah, walaupun belanja pusat meningkat, alokasi TKD selama covid juga naik 4,6% di 2022**. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk terus memperkuat desentralisasi fiskal.



“

We should **elevate** ourselves from being just **tax collectors** and **tax administrators** to being **state builders**.



Allen Kagina,
Commissioner General of the Uganda
Revenue Authority

The often-overlooked role of taxation: as a catalyst for more responsive and accountable governments, expanding state capacity

Beyond revenue:
the state-
building role of
taxation

Perpajakan sebagai *State-Building Process*

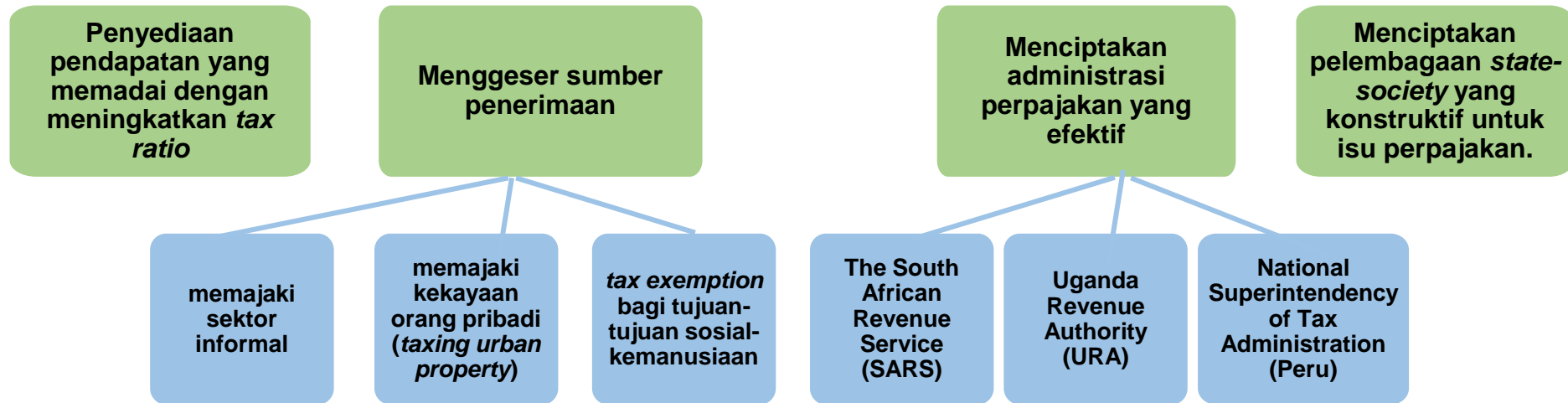


- Pembebanan pajak sebagai proses negosiasi berbasis tawar-menawar (*revenue-bargaining policy*)
- Mendorong demokrasi partisipatif
- Pengembangan institusional bagi penguatan kapasitas negara menjalankan fungsinya secara optimal. Sumbernya: pajak

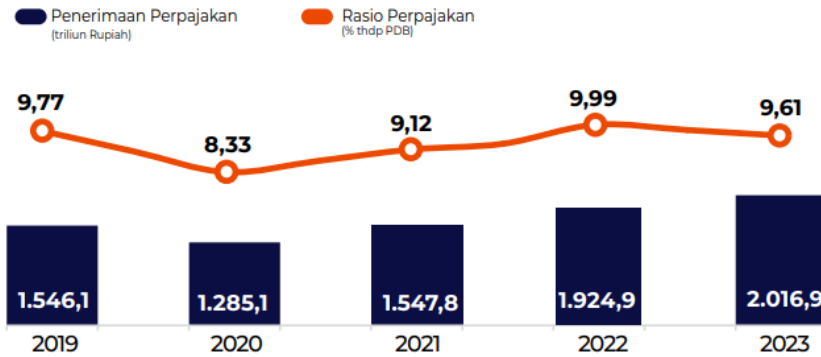




Empat kanal reformasi perpajakan untuk negara berkembang demi meningkatkan *state-building*:



Pajak sebagai Alat Demokrasi dan Gotong-royong: Progresivitas dan Redistribusi



Baseline Penerimaan Perpajakan tahun 2023 memperhitungkan:

- Pertumbuhan aktivitas ekonomi domestik
- Implementasi kebijakan perpajakan.
- Moderasi harga komoditas di tahun 2023.
- Kebijakan yang tidak berlanjut di tahun 2023 (a.l PPS, insentif perpajakan PEN, dan *flush out* CPO).

Kebijakan Perpajakan

- Penguatan pengawasan dan kepatuhan
- Melanjutkan reformasi administrasi perpajakan
- Menjaga efektivitas implementasi Undang-Undang HPP.
- Insentif perpajakan yang lebih terarah

Target Perpajakan naik 13%

- Perpres 98: Rp 1.783 T
- RAPBN 2023: Rp2.016 T

Target Perpajakan & PNBPN naik 8%

- Perpres 98: Rp 2.264 T
- RAPBN 2023: Rp 2.443 T

Pemanfaatan Insentif Pajak Untuk Mendukung Dunia Usaha dan Menjaga Daya Beli Masyarakat



Pemanfaatan Insentif Pajak Tahun 2021 mencapai Rp68,32 T.

Sepanjang tahun 2021, pemanfaatan insentif pajak sangat baik, mencapai 112,6% dari target.

Insentif Dunia Usaha (PMK-9) yang telah dimanfaatkan WP mencapai Rp62,72 triliun

Insentif untuk meningkatkan daya beli masyarakat



106.118 Pemberi Kerja
Rp5,23 T

Insentif untuk membantu likuiditas dan kelangsungan usaha



9.747 WP
Rp17,87 T



58.307 WP
Rp26,89 T



2.857 WP
Rp6,13 T

Insentif penurunan tarif PPh Badan yang berlaku umum



Seluruh WP Badan
Rp5,79 T

Insentif untuk membantu UMKM



138.635 UMKM
Rp0,80 T

Insentif PMK-21 (PPN DTP Rumah) yang telah dimanfaatkan WP mencapai Rp0,79 triliun

Meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung sektor dengan output multiplier yang tinggi



941 Pengembang
Rp0,79 T

Insentif PMK-31 (PPnBM DTP Kendaraan Bermotor) yang telah dimanfaatkan WP mencapai Rp4,63 triliun

Meningkatkan utilitas kapasitas produksi otomotif dan sebagai instrumen pengungkit konsumsi



6 Pabrik
Kendaraan Bermotor
Rp4,63 T

Insentif PMK-102 (PPN DTP Sewa Outlet Ritel) yang telah dimanfaatkan WP mencapai Rp0,18 triliun

Mengurangi beban sektor ritel yang sangat terdampak oleh PPKM



893 Pedagang
Ritel
Rp0,18 T

Catatan: Tidak termasuk Insentif BM DTP. DJP secara berkala melakukan validasi data atas permohonan dan laporan WP sehingga data pemohon dan realisasi dapat berubah (naik ataupun turun) dari waktu ke waktu

DEFISIT – PEMBIAYAAN – UTANG

Pengelolaan Utang yang Kredibel, Akuntabel, dan Transparan

Filosofi pembiayaan pembangunan melalui utang



Menjaga momentum
& menghindari
Opportunity Loss



Menjaga dan
mempercepat
pertumbuhan ekonomi



Mengembangkan
pasar keuangan



Melibatkan peran serta
generasi berikutnya dalam
berinvestasi yang memberi
manfaat jangka panjang
(*sharing the burden*)

Utang merupakan **alat (tools)**, bukan tujuan yang diperlukan agar pemerintah dapat menjalankan fungsi penting dan mendesak dengan lebih cepat **(tanpa penundaan)**